

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi kelembagaan dan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Strategi kelembagaan yang diterapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan PAD mencakup pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat seperti Pokdarwis, pelaksanaan event dan festival budaya, penerapan sistem digitalisasi retribusi, serta kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas. Strategi ini telah menunjukkan arah yang tepat secara kelembagaan, tetapi masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam implementasi, terutama dari aspek pendanaan, sumber daya manusia, dan keterpaduan antarinstansi.
- 2) Peran Dinas Pariwisata dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata meliputi empat aspek utama, yakni: (a) perencanaan strategis melalui penyusunan RIPPDA dan integrasi program pariwisata dalam RPJMD; (b) penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, sarana wisata, dan fasilitas umum; (c) promosi destinasi melalui media sosial dan kegiatan festival; dan (d) pendampingan kepada pelaku wisata melalui pelatihan dan penguatan kapasitas

SDM. Namun, sebagian besar peran ini belum dijalankan secara optimal karena terbatasnya jangkauan program, dominasi pendekatan event-based, dan belum meratanya distribusi pelatihan kepada seluruh desa wisata.

- 3) Berdasarkan kerangka IION (Institutional Implementation Opportunity Need), dapat disimpulkan bahwa kelembagaan pariwisata di Kutai Kartanegara saat ini berada dalam posisi formasi kelembagaan sudah tersedia, namun fungsi kelembagaan belum maksimal. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengubah struktur kelembagaan ini menjadi lebih responsif, kolaboratif, dan adaptif dalam menjawab tantangan pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran sebagai rekomendasi kebijakan dan penguatan kelembagaan:

- 1) Perluasan dan pemerataan program pendampingan kelembagaan masyarakat, khususnya kepada desa-desa wisata yang belum mendapatkan akses pelatihan, guna mendorong terciptanya Pokdarwis yang aktif dan berdaya saing sebagai pelaku utama pariwisata berbasis komunitas.
- 2) Penguatan sistem digitalisasi dan transparansi retribusi pariwisata, melalui pengembangan sistem tiket elektronik yang terintegrasi antar destinasi dan antar-OPD, agar potensi PAD dari sektor ini dapat tercatat secara akuntabel dan terukur.
- 3) Perluasan strategi promosi dan pemasaran digital, tidak hanya bergantung pada event besar, tetapi juga membangun kampanye digital yang berkelanjutan berbasis

citra destinasi (place branding), serta bekerja sama dengan pelaku kreatif lokal dan media online.

- 4) Sinkronisasi program lintas sektor antara Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, dan Dinas PMD, dalam bentuk forum koordinasi kelembagaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, dan pelayanan terpadu di destinasi wisata.
- 5) Evaluasi periodik terhadap strategi kelembagaan dan kebijakan pariwisata berdasarkan indikator kinerja, capaian PAD, serta partisipasi masyarakat, guna memastikan bahwa arah pembangunan sektor pariwisata sesuai dengan visi Kukar Idaman dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.